



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
kesbangpolkabpessel7@gmail.com

NOTULEN

- Rapat : Rapat Staf Pembahasan Laporan/Notulen terhadap Hasil Monitoring Rencana Aksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
- Hari / Tanggal : Selasa/ 29 April 2025
- Waktu Panggilan : 08.00. Wib
- Waktu Rapat : 11.30. Wib
- Tempat : Ruang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Acara : 1. Pembukaan
2. Rapat Staf Pembahasan Laporan/Notulen terhadap Hasil Monitoring Rencana Aksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
3. Penutup
- Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Peserta : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
4. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
5. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan
7. Kasi Badan Kesbangpol
8. Staf Badan Kesbangpol
- Kegiatan Rapat : Rapat Staf Pembahasan Laporan/Notulen terhadap Hasil Monitoring Rencana Aksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
- Kesimpulan Rapat : Setelah dilakukan rapat staf, maka dapat disimpulkan Rapat Staf Pembahasan Kegiatan di Bidang yang Telah Terlaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah melaksanakan 1 upacara sampai dengan triwulan I ini yaitu Hari Kesadaran Nasional (17 Februari 2025). Untuk kegiatan Paskibraka sudah melaksanakan seleksi paskibraka dan telah menyaaring 73 pasukan paskibraka.
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat memiliki 2 kegiatan, yaitu: 1) Jumlah pencatatan Ormas yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I ini ada sebanyak 4 Ormas; 2) Hibah keuangan untuk Partai Politik yang akan dilaksanakan pencairannya pada bulan Juni 2025. Sampai saat ini tahapannya baru

sampai pada penerbitan SK Bupati tentang besaran penerimaan bantuan keuangan untuk 11 Partai Politik.

- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik telah memfasilitasi 4 konflik pada triwulan I ini. Pencairan Honorarium Forkopimda sudah pada tahap pembuatan BPK dan akan segera dicairkan.

Notulis



DELFI ANDILA SARI, S.P.

DOKUMENTASI

